

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 - 2017

Elsara Arinda Putri

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirta, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183

Email: putrielsaraarindaputri@gmail.com

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh UMKM, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia, terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi ini adalah pendekatan *FEM (Fixed Effect Model)*. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tetimpangan pendapatan antar daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.

Kata Kunci: UMKM, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan.

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze affect of the UMKM, economics growth, labor force participation rate, and Human Development Index on income inequality between regencies/municipalities in the Province of Yogyakarta. Whereas the approach FEM (Fixed Effect Model) were used to estimate this regression models. Regression result show that the variables UMKM influential negative and significant on income inequality between regions, whereas economics growth, labor force participation rate, and Human Development Index influential positive and significant on income inequality between regions.

Key Words: *UMKM, economics growth, labor force participation rate, and Human Development Index, and the income inequality*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik negara - negara yang relatif sudah maju maupun yang belum maju. Todaro mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Karena adanya proses pembangunan disetiap daerah maka akan menimbulkan ketimpangan, oleh karena itu perlu pembenahan dalam membuat suatu kebijakan agar ketimpangan di setiap daerah bisa menurun (Syafrizal, 2012).

Menurut BPS, dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat dengan indeks gini (gini ratio). Kisaran dalam indeks gini yaitu 0 - 1. apabila angka indeks gini mendekati 0 menandakan bahwa ketimpangan semakin rendah (merata), namun jika indeks gini mendekati angka 1 maka menandakan bahwa ketimpangan antar masyarakat semakin tinggi atau melebar (<https://yogyakarta.bps.go.id/>).

Tabel 1.1
Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013 - 2017

Provinsi	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	0.433	0.431	0.431	0.411	0.413	0.394
Jawa Barat	0.411	0.413	0.415	0.413	0.403	0.407
Jawa Tengah	0.387	0.379	0.382	0.366	0.365	0.378
DI Yogyakarta	0.439	0.419	0.433	0.420	0.432	0.441
Jawa Timur	0.364	0.369	0.415	0.402	0.396	0.379
Banten	0.399	0.395	0.401	0.394	0.382	0.385
Indonesia	0.413	0.406	0.408	0.397	0.393	0.389

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 1.1 nilai *gini ratio* 2017 dan 2018 tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,432 dan terendah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,365. Terdapat empat Provinsi dengan nilai *gini ratio* di atas angka nasional tahun

2017 sebesar 0,393, yaitu tertinggi Provinsi DI Yogyakarta (0,432), DKI Jakarta (0,413), Jawa Barat (0,403), Jawa Timur (0,396).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto pada suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota (Kuncoro, 2004)

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Pulau Jawa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
(Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1.296.380	1.373.389	1.454.564	1.540.078	1.635.856
Jawa Barat	1.093.544	1.149.216	1.207.232	1.275.528	1.342.953
Jawa Tengah	726.655	764.959	806.765	849.313	894.050
DI Yogyakarta	75.627	79.536	83.474	87.688	92.301
Jawa Timur	1.192.790	1.262.684	1.331.376	1.405.561	1.482.148
Banten	331.099	349.351	368.377	387.824	409.960

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat dari PDRB Provinsi Pulau Jawa bahwa DI Yogyakarta mempunyai nilai PDRB yang paling di karenakan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa memiliki jumlah yang paling sedikit, tercatat PDRB Provinsi DIY pada tahun 2017 sebesar 92.301 miliar rupiah, Provinsi Banten sebesar 409.960, di ikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 89.050miliar rupiah, selanjutnya Provinsi Jawa Barat

sebesar 1.342.953 miliar rupiah, Provinsi Jawa Timur sebesar 1.482.148 miliar rupiah dan Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi di Pulau Jawa sebesar 1.635.856 miliar rupiah.

Secara spasial tahun 2017, gambaran perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa kabupaten sleman memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB DIY yaitu 33,64 persen, diikuti oleh kota Yogyakarta sebesar 26,27 persen. Sementara kontribusi terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 7,60 persen. Sementara proksi besaran pendapatan penduduk dengan PDRB perkapita menurut Kab/Kota, penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta PDRB perkapitanya masih yang tertinggi dan posisi kedua Kabupaten Sleman. PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3 kali lipat daripada PDRB perkapita Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul (BPS DIY, 2018).

PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Fenomena tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. (M.L Jhingan, 2010)

TPAK Provinsi D. I. Yogyakarta tahun 2017 tertinggi yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 74,61% dan terendah yaitu Kota Yogyakarta sebesar 65,72%. Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. “modal pembangunan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah selain keuangan daerah adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari tingkat pasrtisipasi angkatan kerja. (Wiratno, 2009: 8)

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki potensi yang tinggi sebagai daerah maju. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang melimpah. Namun persebaran investasi yang tidak merata di Provinsi D.I. Yogyakarta tentunya akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Hartini, 2017). Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta berusaha mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro mendominasi di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 58%. Giaoutzi et al (1998) menegaskan UKM sebagai faktor pembangunan regional yang bersifat *indigenous* memiliki akar dengan struktur ekonomi lokal. Menurutnya, UKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional yang mampu mereduksi ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik antar wilayah ternyata masih menyisakan beberapa masalah misalnya saja adanya perbedaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta perbedaan investasi yang belum merata yang menimbulkan adanya wilayah yang tertinggal. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan perkapita antar masyarakat dalam suatu Provinsi (Darzal, 2016).

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Astuti (2015) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan usia non-produktif di Provinsi DIY, sehingga memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Merujuk pada latar belakang, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam “ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA TAHUN 2011 - 2017”.

METODE

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2004) data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan adalah data panel dari hasil silang tempat (*cross section*) 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan data silang waktu (*time series*) dari tahun 2011-2017 (7 tahun). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain indeks williamson, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

B. Model Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Indeks Williamson, jumlah UMKM, pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017 maka digunakan Analisis Regresi Linear Berganda (*multiple linear regression methode*) dengan model panel data sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 7 dengan model persamaanya sebagai berikut :

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogUMKM}_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson (ketimpangan pendapatan antar daerah)

LogUMKM = Usaha Mikro, kecil, dan Menengah

PE = Pertumbuhan ekonomi

$TPAK$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

<i>IPM</i>	=	Indeks Pembangunan Manusia
<i>i</i>	=	<i>Cross section</i>
<i>t</i>	=	<i>Time series</i>
β	=	Koefisien
<i>e</i>	=	<i>Error term</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas pada penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel $< 0,9$ yang berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 5.1
Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG(UMKM)	TPAK	LPE	IPM
LOG(UMKM)	1.000000	0.526965	-0.623002	-0.766261
TPAK	0.526965	1.000000	-0.587252	-0.660303
LPE	-0.623002	-0.587252	1.000000	0.657282
IPM	-0.766261	-0.660303	0.657282	1.000000

Sumber : Data Diolah, 2019

sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen pada penelitian ini terbebas dari masalah multiokolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu penyimpangan asumsi klasik OLS dalam bentuk varian gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak konstan. Hasil analisis menunjukkan p-value Prob lebih besar dari nilai Alpha, maka varians error bersifat homoskedastis

Tabel 5.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(UMKM)	-0.036128	0.027739	-1.302.407	0.2042
TPAK	-0.000831	0.001185	-0.701078	0.4895
PE	0.012947	0.026189	0.494382	0.6252
IPM	0.008983	0.005574	1611481	0.1191
C	-0.214761	0.362705	-0.592109	0.5589

Sumber : Data Diolah, 2019

sesuai tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

B. Uji Statistik

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, maka model analisis terbaik yang didapat yaitu *fixed effect model*.

Tabel
Hasil Uji Statistik dari Fixed Effect

Variable	Coefficient	t-	Probabilitas	R-	F-	Prob (F-
		Statistic		Square	Statistic	Statistic)
C	0.069582	4.178635	0.0003	0.999958	77452.14	0.000000
LogUMKM	-0.003111	-2.836867	0.0087			
TPAK	0.000125	2.667919	0.0130			
LPE	0.002450	2.713257	0.0117			
IPM	0.001575	8.287042	0.0000			

Sumber: Data Olahan Eviews

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t-statistik)

- a. Koefisien variabel dari LogUMKM adalah -0.003111 dan probabilitasnya sebesar $0.0087 < \alpha = 5\%$ Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya, apabila UMKM meningkat sebesar 1 unit maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0.003111 persen.

- b. Koefisien variabel dari TPAK adalah 0.000125 dan probabilitasnya sebesar $0.0130 < \alpha = 5\%$. ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, apabila TPAK meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0.000125 persen.
- c. Koefisien variabel dari PE adalah 0.002450 dan probabilitasnya sebesar $0.0117 < \alpha = 5\%$. ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, apabila PE meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0.002450 persen.
- d. Koefisien variabel dari IPM adalah 0.001575 dan probabilitasnya sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$. ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, apabila IPM meningkat sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan naik sebesar 0.001575 persen.

2. Uji Signifikansi Bersama-sama (uji F)

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen. Dengan menggunakan *fixed effect model* F-statistik sebesar 77452.14 dengan probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi R^2 dengan pendekatan *Fixed Effect Model* sebesar 0.999958 atau 99%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel ketimpangan

pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta mampu dijelaskan oleh variabel UMKM, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM sebesar 99%. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitan atau estimasi model diatas maka dapat dibuat suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (UMKM, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta yang diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh UMKM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai koefisien sebesar -0.003111 menunjukkan bahwa apabila UMKM meningkat sebesar 1 unit maka berpengaruh pada penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0.003%.

Perkembangan UMKM di Kab/Kota di Provinsi DIY meningkat setiap tahunnya, peningkatan tersebut mencerminkan kenaikan investasi, penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga cukup besar. Hal ini terbukti pada tahun 2017 pencapaian penyerapan terbanyak yaitu pada usaha mikro sebesar 58% dan usaha kecil sebesar 18%.

UMKM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY, ini berarti jika UMKM meningkat maka ketimpangan akan turun. Dengan adanya UMKM yang terus bertambah di Kab/kota di Provinsi DIY maka semakin banyak tenaga kerja yang akan terserap dan ketimpangan akan semakin rendah atau distribusi pendapatan semakin merata. Dalam teorinya Harrod-Domar menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat

pendapatan per kapita naik karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Dengan persebaran dan kenaikan investasi maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh TPAK terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai koefisien sebesar 0.000125 dan probabilitas 0.0130 menunjukkan bahwa apabila TPAK meningkat sebesar 1% maka berpengaruh pada peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 0.000125.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Danawati dkk (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Memperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Menurut Danawati salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada disuatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong ataupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menanbah produksi untuk memenuhi pasar domestik yang meningkat. Namun disisi lain, penambahan penduduk bisa saja berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhannya masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan penduduk yang tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia,

dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestic Bruto pada suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota (Kuncoro, 2004:64)

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai koefisien dan probabilitas masing-masing 0.002450 dan 0.0117 hal ini berarti bahwa apabila variabel PE meningkat 1 persen pertahun maka menyebabkan ketimpangan pendapatan (IW) naik sebesar 0.002450 pertahun.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh fafan (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2001-2012 yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini juga diperkuat oleh teori Neo Marxist yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara di kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya non pemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan semakin terlihat. Ketika

akumulasi modal tidak merata atau hanya dikuasi oleh kelompok tertentu, maka distribusi pendapatan juga hanya akan bergerak pada kelompok tersebut, dan distribusi pendapatan akan semakin timpang karena para non pemilik modal akan tetap berada dalam kemiskinan.

4. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai koefisien dan probabilitas masing-masing 0.001575 dan 0.0000. Hal ini berarti bahwa apabila variabel IPM meningkat 1 persen pertahun maka menyebabkan ketimpangan pendapatan (IW) naik sebesar 0.001575 pertahun.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti (2015) tentang analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2013, menghasilkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia secara rata-rata. Komponen dari perhitungan IPM meliputi angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan pada masyarakat. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan Teori *Human Capital* bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi data panel mengenai pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Williamson) yang mencakup setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011-2017 berkisar antara 0,026 sampai 0,465. tahun 2017 Ketimpangan tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dengan nilai 0.465 persen hal ini dikarenakan karena Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi dan pendapatan perkapita yang juga tinggi dan merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Sleman mempunyai ketimpangan terendah hanya 0.036 persen.
2. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

4. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
5. Berdasarkan hasil pengujian maka Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
6. Berdasarkan hasil pengujian variasi variabel ketimpangan pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta mampu dijelaskan oleh variabel UMKM, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM sebesar 99%. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka yang diberikan peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan cara pelatihan-pelatihan pada setiap Kab/Kota agar UMKM semakin berkembang pada wilayah tersebut dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Manusia berdampak meningkatkan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, karena komponen IPM banyak, maka pemerintah perlu untuk mengkaji lebih dalam agar program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan IPM tepat sasaran. Misalnya, dengan cara meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Indeks pembangunan Manusia.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang lebih bervariasi agar bisa mewakili faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. A. (2018). “Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016”. *Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Univrsitas Islam Indonesia*.
- Arif, M. dan Wicaksani, R. A. (2017). “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”. *The 6 University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Astuti, Riska. (2015). “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2005-2013)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Basuki, A. T. (2017). *Ekonometrika dan Aplikasi Dalam Ekonomi*. Yogyakarta.
- BPS DIY (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*.
- BPS DIY SE (2018). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi D. I. Yogyakarta*.
- BPS DIY (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2017*.
- BPS DIY (2018). *Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*.
- BPS RI (2018) *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2013 – 2017*.
- BPS DIY (2018). *Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- BPS RI (2018). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017, Buku 2 Pulau Jawa-Bali*.
- Cristescu, A., Stanila, L. & Vasilescu, M. D. (2014). The Analysis of Regional Earnings Inequalities in Romania. *Theoretical and Applied Economics Volume XXI, No. 8(597), pp. 7-18*.

- Darzal. (2016). “Analisis Disparitas pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 4*.
- Estudillo, Jonna P. (1997). Income Inequality in the Philippines 1961-91. *Jurnal The Developing Economics, XXXV-1 (March 1997) : 68-95*.
- Fulsang, Simon. (2013). Determinants of Income Inequality: Sub-Saharan Perspective. *Thesis Aarhus University*.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics*. International Edition. McGraw Hill.
- Hartini, Nita Tri. (2017). “Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015”. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 6. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Hudiyanto. (2001). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta
- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnetz, S. (1995). *Quatitative Aspect of Economics Growth of Natiom: I. Economics Development and Cultural Change (Vol. V)*.
- Kyosuke, K. & Takashi, K. (2007). The Dynamics of Growth, Proverty and Inequality : A Panel Analysis of Regional Data From the Philippines and Thailand. *Hitotsubashi University Respository*.
- Lestari, Susi. (2015). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012”. *Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.

- Masli, Lili. (2008). "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Nikoloski, Zlato. Economics and Political Determinants if Income Inequality. *Thesis University College London*.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). "Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Petumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 2*.
- Raharjo, Adisasmito. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahma, Ellza A. (2018). "Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa". *Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Univrsitas Islam Indonesia*.
- Robinson, Tarigan. (2005). *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Bumi.
- Sadono, Sukirno. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Payaman. J. (1985). *P.roduktivitas dan Tenaga Kerja Indonsia*. Jakarta: FE UI
- Simanjuntak, Payaman. J. (2001). *Ekonomi Sumber Data Manusia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman. J. (2005). *Ekonomi Sumber Data Manusia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : LPFE UI.

Sultan, Jamzani S. (2010). “Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jateng Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Periode (2000-2004)”. *Buletin Ekonomi, Vol 8, No. 1, April*.

Syafriza.l (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pres.

Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya.

Syafrizal. (2011). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh*. Diterjemahkan oleh Haris Munawar. Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael. P dan Smith, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga (Terjemahan)*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael. P. (1995). *Ekonomi untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Wiratno, Bagus Suyono. (2009). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.

<http://peta-kota.blogspot.com/>